

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI MALUKU

A. Gambaran Umum Provinsi Maluku

a. Sejarah Provinsi Maluku

Maluku merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia merdeka, dikenal dengan kawasan Seribu Pulau serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Secara historis kepulauan Maluku terdiri dari kerajaan-kerajaan Islam yang menguasai pulau-pulau tersebut. Oleh karena itu, diberi nama Maluku yang berasal dari kata *Al Mulk* yang berarti Tanah Raja-Raja. Daerah ini dinyatakan sebagai provinsi bersama tujuh daerah lainnya. Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera, hanya dua hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun secara resmi pembentukan Maluku sebagai propinsi daerah tingkat I RI baru terjadi 12 tahun kemudian, berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 22 tahun 1957 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1958.

Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kepulauan Maluku memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia secara keseluruhan. Kawasan kepulauan yang kaya dengan rempah-rempah ini sudah dikenal di dunia internasional sejak dahulu kala. Pada awal abad ke-7 pelaut-pelaut dari daratan Cina, khususnya pada zaman Dinasti Tang, kerap mengunjungi Maluku untuk mencari rempah-rempah. Namun mereka sengaja merahasiakannya untuk mencegah datangnya bangsa-bangsa lain ke daerah ini. Pada abad ke-9 pedagang Arab berhasil menemukan Maluku setelah mengarungi Samudra Hindia. Para pedagang ini kemudian menguasai pasar Eropa melalui kota-kota pelabuhan seperti Konstatinopel. Abad ke-14 adalah merupakan masa perdagangan rempah-rempah Timur Tengah yang membawa agama Islam masuk ke Kepulauan Maluku melalui pelabuhan-pelabuhan Aceh, Malaka, dan Gresik antara tahun 1300 sampai 1400.

Pada abad ke-12 wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi Kepulauan Maluku. Pada awal abad ke-14 Kerajaan Majapahit menguasai seluruh wilayah laut Asia Tenggara. Pada waktu itu para pedagang dari Jawa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Di masa Dinasti Ming (1368 ? 1643) rempah-rempah dari Maluku diperkenalkan dalam berbagai karya seni dan sejarah. Dalam

sebuah lukisan karya W.P. Groeneveldt yang berjudul Gunung Dupa, Maluku digambarkan sebagai wilayah bergunung-gunung yang hijau dan dipenuhi pohon cengkik, sebuah oase ditengah laut sebelah tenggara. Marco Polo juga menggambarkan perdagangan cengkik di Maluku dalam kunjungannya di Sumatera.

Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku adalah Portugis, pada tahun 1512. Pada waktu itu 2 armada Portugis, masing-masing dibawah pimpinan Anthony d'Abreu dan Fransisco Serau, mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat - seperti dengan Kerajaan Ternate di pulau Ternate, Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli, begitupula Negeri Hitu lama, dan Mamala di Pulau Ambon. Namun hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama, karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis, dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Steven van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda.

Pecahnya Perang Pasifik tanggal 7 Desember 1941 sebagai bagian dari Perang Dunia II mencatat era baru dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maluku dinyatakan sebagai salah satu propinsi Republik Indonesia. Namun pembentukan dan kedudukan Propinsi Maluku saat itu terpaksa dilakukan di Jakarta, sebab segera setelah Jepang menyerah, Belanda (NICA) langsung memasuki Maluku dan menghidupkan kembali sistem pemerintahan kolonial di Maluku. Belanda terus berusaha menguasai daerah yang kaya dengan rempah-rempahnya ini bahkan hingga setelah keluarnya pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 dengan mensponsori terbentuknya Republik Maluku Selatan (RMS). (www.malukuprov.go.id , Diakses pada tanggal 21 Mei 2010)

b. Kondisi Wilayah

Maluku (*Moluccas*) sebagai provinsi kepulauan adalah salah satu dari 33 provinsi di Indonesia, terletak pada bagian timur Indonesia, hampir sebagian besar wilayahnya dikelilingi laut. Secara administratif batas-batas wilayah provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- a) Bagian utara berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara
- b) Bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia
- c) Bagian barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
- d) Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Papua

Provinsi Maluku terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota. Sembilan kabupaten tersebut adalah Maluku Tengah dengan Masohi sebagai ibukotanya, Maluku Tenggara dengan Tual sebagai ibukotanya, Maluku Tenggara Barat dengan Saumlaki sebagai ibukotanya, Buru dengan Namlea sebagai ibukotanya, Seram Bagian Barat dengan Piru sebagai ibukotanya, Seram Bagian Timur dengan Bula sebagai ibukotanya, Aru dengan Dobo sebagai ibukotanya dan kota Ambon dengan Ambon sebagai ibukotanya.

c. Demografi wilayah

Provinsi Maluku terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil. Ibu kotanya adalah Ambon. Provinsi ini disebut juga dengan "Kepulauan rempah-rempah" karena provinsi ini merupakan penghasil cengkeh dan pala. Penduduk asli Provinsi Maluku adalah orang Ambon. Banyak pula orang-orang dari daerah lainnya yang menetap di Maluku, misalnya orang Jawa dan orang Bugis yang datang ke sana

sebagai pedagang. Beberapa tahun yang lalu Provinsi Maluku dibagi menjadi dua, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Propinsi Maluku Selatan.

Hasil Sensus tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Maluku sebanyak 1.200.000 jiwa .Sebagian besar penduduk daerah ini berdiam di wilayah pedesaan pada tahun 1995 : 75,43 %, umumnya terletak di pesisir pantai sedangkan yang berdiam di daerah perkotaan sekitar 24,57 %. Penyebaran penduduk tidak merata, dimana konsentrasi penduduk pada umumnya di pulau-pulau kecil seperti Ambon, Kepulauan Lease, Kei Kecil dan sebagian pulau sedang dan besar dapat dikatakan jarang penduduknya.

d. Visi dan Misi Provinsi Maluku

1. VISI

Terwujudnya perikehidupan masyarakat Maluku yang rukun, aman, damai dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh warga masyarakat yang bertaqwa, memiliki rasa cinta kasih dan berakhlak mualia, berkesadaran hukum dan lingkungan, serta memiliki etos kerja yang tinggi.

2. MISI

1. Penciptaan kondisi aman, damai, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan sehari-hari dan mantapnya persaudaraan umat beragama, berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai
3. Penegakan hukum dan hak azasi manusia yang menjamin tegaknya tatanan kehidupan bermasyarakat berlandaskan keadilan dan kebenaran. Dalam hubungan ini, aparaturnya penegak hukum akan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas, disamping mengefektifkan tatanan hukum lokal seperti Sasi dan sejenisnya.
4. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, meningkatkan pembangunan wilayah secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. Dalam hubungan ini, akan ditingkatkan peranan lembaga-lembaga keuangan dalam rangka mendorong investasi melalui penggalakan tabungan masyarakat.

5. Pemanfaatan berbagai potensi sumber daya alam spesifik daerah seoptimal mungkin dengan mendorong perkembangan pengusaha lokal baik dalam memenuhi kebutuhan akan modal (investasi), maupun dalam membuka akses dalam kompetisi pasar global baik nasional, regional, maupun internasional.
6. Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memacu percepatan pembangunan daerah dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dampak konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Peningkatan kualitas aparatur Pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, profesional, buerdaya guna, produktif, transparan, demokratis serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat sert peningkatan ketahanan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga secara bertahap memiliki daya tahan, kemandirian, kemampuan menghidupkan diri, keluarga dan lingkungannya.

9. Penciptaan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu pada seluruh tatanan terutama pada Perguruan Tinggi, guna meningkatkan etos kerja dan daya saing, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

10. Penciptaan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.

B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku

a. VISI, MISI dan Arah kebijakan Pembangunan

a) VISI

Visi adalah alasan filosofis keberadaan suatu lembaga atau organisasi yang berhubungan dengan gambaran tentang apa yang akan terjadi dan menjadi arah atau pegangan bagi lembaga dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berkesinambungan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Maluku (RPJMD) tahun 2008-2013, Visi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku adalah: "Terwujudnya Maluku

sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan persahabatan.” (Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2008-2013, 2008:27)

b) MISI

Misi pembangunan kebudayaan dan pariwisata Maluku, adalah sebagai berikut:

1. Berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan Maluku dengan melestarikan sumber daya budaya, sumber daya alam yang beraneka ragam, serta sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
2. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan masyarakat Maluku guna terciptanya persahabatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Pengembangan produk wisata dengan menitikberatkan pada wisata alam dan budaya.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pemasaran produk wisata.
5. Meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Sadar Wisata.

6. Menjadikan Maluku sebagai tempat *event* wisata internasional.

c) Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam kurun waktu 2009-2013 kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan kepada:

1. Meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam perilaku masyarakat Maluku.
2. Meningkatkan pengelolaan kebudayaan daerah meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Maluku.
3. Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya daerah.
4. Meningkatkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
5. Meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat nasional dan global.

b. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku

Berdasarkan peraturan daerah provinsi Maluku No. 03 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas

provinsi Maluku Bab IX bagian kedua pasal 30. (Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2008-2013, 2008:4-6)

Struktur organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Maluku, terdiri dari :

1. Susunan Organisasi Dinas

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat
- c) Bidang Budaya dan Seni
- d) Bidang Sejarah dan Purbakala
- e) Bidang Produk dan Usaha Pariwisata
- f) Bidang Pemasaran Pariwisata
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sejalan dengan struktur organisasi dimaksud Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku juga memiliki dua UPT masing-masing UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum Siwalima yang susunan organisasinya terdiri dari:

a. Taman Budaya

- a) Kepala Taman Budaya

- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi Penyajian Apresiatif
- d) Jabatan Fungsional

b. Museum Siwalima

- a) Kepala Museum
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Jabatan Fungsional

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG
PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	SD	6	
2.	SMP	4	
3.	SMA	51	
4.	AKADEMI/DIPLOMA	7	
5.	SARJANA	30	
6.	PASCA SARJANA	6	

TABEL I.4
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	I	4	
2.	II	30	
3.	III	60	
4.	IV	10	

TABEL 1.5
KEADAAN PEGAWAI
BERDASARKAN JABATAN ESELON II DAN III

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	ESELON	KET
1.	Kepala Dinas	S1. Sejarah & Antropologi	Ila	Dilantik akhir th. 2008
2.	Kasubdin Pemasaran	S1. Bahasa Inggris	IIIa	Dilantik th. 2007
3.	Kasubdin Program	S1 Ekonomi & S2 Administrasi keuangan	IIIa	
4.	Kasubdin Sarana dan Jasa Wisata	S1 Ekonomi & S2 Administrasi	IIIa	Dilantik tahun 2007
5.	Kasubdin SDM	S1 Pendidikan, S2 Administrasi	IIIa	Dilantik th. 2007
6.	Kabag. Tata Usaha	S1 Ekonomi	IIIa	Dilantik th.2007

7.	Kasubdin Kesenian	S1 Administrasi	IIIa	
8.	Kasubdin Sejarah & Purbakala	S1 Administrasi	IIIa	

TABEL I.5
KEADAAN PEGAWAI
BERDASARKAN JABATAN ESELON IV

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Kasi Penyusunan Anggaran	S1 EKONOMI	
2.	Kasi Pendataan	Sarjana Muda Pariwisata	
3.	Kasi Evaluasi dan Pelaporan	S1 SOSPOL	
4.	Kasi Pemantauan dan Pengendalian	-	Pindah ke biro Pemerintahan
5.	Kasi Promosi	S1 Bahasa Inggris	Dilantik th. 2007
6.	Kasi Analisa Pasar	S1 Ekonomi	Dilantik th. 2007
7.	Kasi Infromasi Pasar	Sarjana Muda Bahasa Jerman	
8.	Kasi Pendidikan dan Pelatihan	S1 Administrasi	
9.	Kasi Pembinaan dan Penyuluhan	S1 Bahasa Inggris	
10.	Kasi Sarana Wisata	S1 administrasi	
11.	Kasi jasa wisata	D1 pariwisata	
12.	Kasi Aneka Wisata	D2 pariwisata	Dilantik th. 2007
13.	Kasi ODTW budaya	S1 ekonomi	
14.	Kasi ODTW Alam	Stm	
15.	Kasi Rekreasi dan Hiburan Umum	Smu	

16.	Kasubag Kepegawaian	S1 administrasi	
17.	Kasubag UMUM	-	Belum ada pejabat
18.	Kasi Permusiuman	S1 hukum	
19.	Kasi Pembinaan Kesejarahan	S1	
20.	Kasi Sarana	S1 pendidikan	
21.	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sastra Indonesia Daerah	S1 pendidikan	
22.	Kasi Pemanfaatan dan Pelindungan Seni	S1 administrasi	
23.	Kasi Layanan Teknis	S1 administrasi	
24.	Kasi pemberdayaan Masyarakat		
25.	Kasubag Keuangan	Sarjana muda bahasa	
26.	Kasi Apresiasi Seni	S1 Administrasi	

C. Obyek Wisata Provinsi Maluku

Maluku terkenal akan keindahan alamnya terutama kawasan pantai dan pesisir. Obyek-obyek wisata di Maluku yang masuk ke dalam kepengurusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku yaitu:

1. Pantai Natsepa, Ambon
2. Pintu Kota, Ambon
3. Benteng Duurstede, Saparua
4. Benteng Amsterdam, Ambon
5. Benteng Victoria, Ambon
6. Banda Neira, Banda

7. Benteng Belgica, Banda
8. Pantai Hunimoa, Ambon
9. Pantai Ngur Samadan (Pasir Panjang), Kai
10. Gua Ohoidertavun di Letvuan, Kai
11. Sawai, Seram
12. Leksula, Buru
13. Pintu Kota, Ambon
14. Pantai Latuhalat, Ambon
15. Tanjung Marthafons, Ambon
16. Taman Manusela, Seram
17. Air Terjun Waihetu, Rumahkay, Seram
18. Pantai Hatuurang
19. Pantai Lokki, Seram
20. Pantai Englas, Seram
21. Pulau Pombo
22. Pulau Tiga
23. Pulau Luciapara
24. Pulau Ay, Run dan Rozengain (Hatta), Kep. Banda
25. Weluan, Kep. Tanimbar
26. Pulau Bais
27. Tanjung Sesar, Seram
28. Pulau Panjang, Pulau Lulpus dan Pulau Garogos
29. Gunung Boy
30. Kilfura, Seram
31. Pantai Soplesy, Seram
32. Gua Lusiala, Seram
33. Pantai Kobisadar
34. Ahuralo, Amahai

35. Gua Hutan Kartenes
36. Goa Akohy di Tamilouw, Seram
37. Benteng Titaley, Seram
38. Danau Binaya, Piliana